

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 114.714.794, dibandingkan dengan pada 31 Desember 2022 Rp 9.736.500. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 20.095.814.314 atau mencapai 99.87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 20.121.834.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 19.039.279.770 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 550.725.642 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 18.488.554.128 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.775.557 dan Rp 19.037.504.213.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.114.714.794, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.23.156.688.145, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(23.041.973.351) dibandingkan pada periode 31 Desember 2022 Rp.(18.322.890.671). Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(23.041,973.351).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.22.097.073.044 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(23.041.973.351) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.19.982.404.520 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.19.037.504.213 dibandingkan pada Tahun Anggaran 2022 Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.25.299.870.673 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(18.315.514.171) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp(20.111.084) dan dikurangi dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.160.001.756 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp22.126.247.174.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	114.714.794	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		-	114.714.794	0,00
BELANJA				
B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.585.284.000	3.572.301.249	99,64
Belanja Barang	B.4	14.454.074.000	14.441.099.968	99,91
Belanja Modal	B.5	2.082.476.000	2.082.413.097	100,00
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-
JUMLAH BELANJA		20.121.834.000	20.095.814.314	99,87

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	550.725.642	577.730.711
Jumlah Aset Lancar		550.725.642	577.730.711
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	2.228.156.034	2.228.156.034
Peralatan dan Mesin	C.15	40.055.217.176	38.043.003.146
Gedung dan Bangunan	C.16	9.428.726.193	9.428.726.193
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	995.251.376	995.251.376
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(34.218.796.651)	(29.174.633.659)
Jumlah Aset Tetap		18.488.554.128	21.520.503.090
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	71.649.067	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(71.649.067)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		19.039.279.770	22.098.233.801
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.25	1.775.557	1.160.757
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.775.557	1.160.757
JUMLAH KEWAJIBAN		1.775.557	1.160.757
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	19.037.504.213	22.097.073.044
JUMLAH EKUITAS		19.037.504.213	22.097.073.044
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.039.279.770	22.098.233.801

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 30 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	114.714.794	-
JUMLAH PENDAPATAN		114.714.794	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.572.301.249	3.556.515.085
Beban Persediaan	D.3	215.516.000	169.931.834
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.219.248.920	7.094.677.825
Beban Pemeliharaan	D.5	1.341.238.310	2.076.708.699
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.692.716.607	1.124.643.175
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5.115.667.059	4.173.966.524
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		23.156.688.145	18.196.443.142
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(23.041.973.351)	(18.196.443.142)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	9.376.500
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	(140.450.926)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(23.041.973.351)	(18.313.514.171)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(23.041.973.351)	(18.313.514.171)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	22.126.247.174	25.299.870.673
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(23.041.973.351)	(18.313.514.171)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	(20.111.084)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	19.982.404.520	15.160.001.756
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3.059.568.831)	(3.176.623.499)
EKUITAS AKHIR	E.5	19.037.504.213	22.126.247.174

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	<p>Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: per.33/pERMEN-Kp/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber dayakelautan dan perikanan;2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;3. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;5. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan;7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan
--	---

pengawasan kapal pengawas;

8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berkomitmen dengan visi “**pelaksanaan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di lingkup Stasiun PSDKP Tahuna**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja.
- Meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah kerja.
- Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di wilayah Stasiun PSDKP Tahuna.

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Lembaga, Memberantas IUU Fishing untuk meningkatkan kedaulatan Ekonomi, Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha masyarakat kelautan dan perikanan.

Stasiun PSDKP Tahuna memiliki Sumberdaya Manusia bidang kelautan dan perikanan yang berstatus PNS sebanyak 20 Orang dan Tenaga kontrak sebanyak 12

Orang.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Tahun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengawasan SDKP Tahunna menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Tahunana dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian persediaan secara First In Frist Out di tahun 2023 sesuai surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 Tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik Persediaan Masuk dan Persediaan Keluar agar dilakukan sesuai urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang

LO

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
 - Rapat pembahasan permasalahan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan pencatatan dan pelaporan BMN Tahun 2017 dan 2019
1. Kebijakan akuntansi dan pencatatan persediaan
 - a. Persediaan Biota Ikan
 - KSAP belum mengatur standar akuntansi terkait aset biologis sebagai persediaan;
 - Perlu ada standar akuntansi untuk mencatat

aset biologis, dhi. di lingkungan KKP berupa Persediaan biota ikan;

- KKP telah menerbitkan:
 - 1) Perdirjen Perikanan Budidaya Perdirjen PB No.300/PER-DJPB/2019 tanggal 28 September 2019 tentang pedoman umum penatausahaan barang persediaan kegiatan perekayasaan dan produksi di unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 - 2) SE Sekjen No.B.1550/SJ/PL.930/XII/2019 pada tanggal 28 Desember 2019 tentang penatausahaan barang milik negara berupa persediaan;
 - KKP perlu melakukan evaluasi kembali atas SE Sekjen dan Perdirjen Perikanan Budidaya terkait pencatatan persediaan khususnya persediaan biota ikan yang disesuaikan dengan karakteristik nilai dan kuantitas persediaan (PNBP atau metode lainnya).
- b. Persediaan Suku Cadang Kapal
- Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap dicatat sebagai persediaan;
 - KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada di kapal.
- c. Persediaan BBM Kapal
- Pencatatan persediaan BBM Kapal dikeluarkan dari Neraca namun perlu diungkap dalam CaLK KKP;
 - BBM yang berada di kapal diperlakukan

sebagai beban persediaan pada saat BBM diisi ke tangki kapal;

- Mengutip pernyataan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tingkat akurasi hasil stok opname fisik BBM di kapal tergantung pada posisi dan kondisi kapal;
- Cost untuk menghitung persediaan BBM Kapal lebih besar dibandingkan benefit dari pencatatan BBM Kapal, karena secara substansi KKP tidak memiliki gudang penyimpanan BBM kapal;
- KKP perlu membuat aturan terkait mekanisme pengendalian penggunaan BBM oleh Kapal, untuk mencegah penyalahgunaan BBM Kapal sebagai laporan manajerial;
- Di Tahun 2020 diperlukan review ulang atas penganggaran belanja BBM yang selama ini sebagai belanja persediaan

2. Pencatatan Aset Tetap & Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

a. Aset Tetap

- Aset Tetap Tanah yang bersaldo tidak normal, merupakan aset urugan untuk pematangan tanah senilai Rp1,88 miliar sebanyak 3 NUP di atas tanah milik Pemprov Sumatera Utara, Jambi, dan Sulawesi Tengah
 - Aset tanah di atas tanah pemda, dilakukan koreksi menjadi ATR pada Satker Konsolidasi di tahun 2019 dan akan dilakukan koreksi di tingkat satker di tahun 2020. Selanjutnya KKP akan melakukan

proses hibah ATR tersebut ke penda terkait.

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp156 jt secara substansi merupakan persediaan habis pakai dan nilai buku sudah nihil. KKP di tahun 2020 akan melakukan penghapusan aset tersebut.
- Transaksi penyusutan tidak wajar senilai Rp50,98 miliar:
 - KKP akan mengungkapkan adanya penyusutan tidak wajar pada laporan keuangan Tahun 2019.
 - KKP akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk menyelesaikan penyusutan tidak wajar pada Aplikasi SIMAK di Tahun 2020

b. KDP

- Saldo KDP perolehan 2008-2017 sebanyak 281 NUP bernilai negatif senilai Rp78,87 Miliar
 - Aset KDP bernilai negatif tidak mempengaruhi nilai saldo KDP di Neraca KKP per 31 Desember 2019, karena KDP yang dimaksud bernilai negatif per NUP juga memiliki nilai positif di NUP yang berbeda atas KDP yang sama.
 - KDP bernilai negatif terjadi karena satker saat melakukan penginputan KDP menjadi aset defenitif menggunakan NUP yang berbeda dengan NUP KDP awal.
 - NUP Aset KDP yg telah ditemukan aset defenitifnya sebanyak 105 NUP senilai Rp40,10 miliar.

- KDP memiliki transaksi mutasi yang tidak wajar senilai Rp0,79 Milyar antara lain penambahan/pengembangan/transfer masuk dinilai minus, transfer keluar dinilai positif yang merupakan bagian dari KDP sebanyak 281 NUP bernilai negatif sebesar Rp78,87 Miliar
- Mutasi keluar dari KDP senilai Rp3,18 Milyar tidak menambah aset tetap
 - Sebesar Rp1,9 Miliar sedang dilakukan inventarisasi.
 - Sebesar Rp1,2 Miliar telah ditemukan asetnya dan akan dicatat sebagai penambahan saldo awal pada Tahun 2020

3. ATB

- Saldo Hasil Kajian/Penelitian (Rekomendasi Teknologi) senilai Rp11,09 miliar akan dilakukan koreksi pada laporan keuangan Tahun 2019 karena secara substansi bukan merupakan ATB.
- Saldo Paten senilai Rp12,70 Miliar belum memasukkan:
 - 4 Paten belum jelas status sertifikatnya
 - 6 Paten sudah memiliki sertifikatKKP akan melakukan inventarisasi biaya perolehan.
- Amortisasi :
 - Amortisasi 26 paten senilai Rp1,04 Miliar belum didukung bukti pendaftaran.
 - Tanggal penerimaan 10 paten senilai Rp0,41 Miliar berbeda dengan tanggal perolehan untuk perhitungan

21
amortisasinya.

KKP akan melakukan inventarisasi bukti pendaftaran dan tanggal perolehan ATB.

- ATB pada Direktorat Pakan dan Obat Ikan tidak ditemukan senilai Rp221,48 juta
 - KKP telah mengidentifikasi jenis ATB tersebut. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dokumen perolehan ATB. Apabila ATB tersebut sudah tidak digunakan akan dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali

(revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih

rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna* telah melakukan 13 (tiga belas) kali revisi; pertama adalah Revisi Halaman IV A DIPA dengan pertimbangan dilakukan Revisi Automatic adjusment untuk pemenuhan ketersediaan dana cadangan negara; Kedua, revisi kanwil dengan alasan koreksi halaman III DIPA untuk penyesuaian terhadap belanja kegiatan; ketiga, revisi kanwil Halaman III DIPA untuk perbaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TW III; Keempat, revisi Halaman III DIPA dengan alasan perubahan kebijakan pelaksanaan anggaran terhadap kondisi prioritas kebutuhan belanja; Kelima, revisi DJA pergeseran Pagu AA senilai Rp.987.892.000 ke Pusat

untuk antisipasi perubahan kondiusi dan prioritas kebutuhan; Keenam, revisi kanwil penyesuaian halaman III DIPA, Pergeseran Belanja dalam RO untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja anggaran; Ketujuh, Revisi Kanwil halaman III DIPA pergeseran sisa belanja modal ke belanja barang untuk untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja anggaran; Kedelapan, Revisi DJA pergeseran belanja Pegawai untuk optimalisasi ke pusat; Kesembilan, Revisi DJA pergeseran blokir AA untuk Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dari anggaran yang ada; Sepuluh, revisi dit. PA untuk pergeseran Pagu blokir AA; Sebelas, revisi DJA untuk menambah operasional hari operasi kapal pengawas; Duabelas, Revisi Dit.PA untuk revisi belanja pegawai ke belanja barang sebagai langkah efisiensi kualitas belanja; Tigabelas, revisi kanwil untuk RO yang sama (POK) sebagai efisiensi pengelolaan anggran belanja.

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	3.862.896.000	3.585.284.000
Belanja Barang	13.010.221.000	14.454.074.000
Belanja Modal	2.082.476.000	2.082.476.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	18.955.593.000	20.121.834.000

Realisasi**Pendapatan****Rp114.714.794****B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 114.714.794. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023	
	Anggaran	Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	114.714.794
Penerimaan Hibah	-	-
Jumlah	-	114.714.794

PNBP tahun 2023 berasal dari hasil Pembayaran atas sanksi administrasi berupa 2 kapal ikan Indonesia dan 1 Proyek pembangunan reklamasi di Tahuna.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara	114.714.794	9.376.500	8,17
Penerimaan Hibah	-	-	0,00
Jumlah	114.714.794	9.376.500	0,00

Dari tabel perbandingan diatas terlihat adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2023, Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan penerapan sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Tahuna atas hasil tindak Pengawasan SDKP yang semuanya telah selesai dibayar tepat pada waktunya.

Realisasi Belanja**Negara****Rp20.095.814.314****B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 20.095.814.314. atau 99.87% dari anggaran belanja sebesar Rp 20.121.834.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.585.284.000	3.572.301.249	39,82
Belanja Barang	14.454.074.000	14.441.099.968	99,91
Belanja Modal	2.082.476.000	2.082.413.097	100,00
Belanja Bantuan Sosial		-	-
Total Belanja Kotor	20.121.834.000	20.095.814.314	99,87
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	20.121.834.000	20.095.814.314	99,87

Realisasi anggaran tahun 2023 menurut jenis belanja, seperti pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa sampai dengan bulan Desember tahun 2023, penyerapan anggaran belum menunjukkan 99.87%. Nilai belanja yang paling sedikit terdapat pada jenis Belanja Modal, hal ini di karenakan terdapat efisiensi pemotongan anggaran dan pekerjaan fisik sudah selesai dilakukan di tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	'31 Desember 2023	'31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.572.301.249	3.556.515.085	-
Belanja Barang	14.441.099.968	10.599.002.151	-
Belanja Modal	2.082.413.097	920.643.220	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	20.095.814.314	15.076.160.456	-

Jika dilihat pada tabel perbandingan jenis belanja tahun 2023 dan 2022 diatas, ada kenaikan yang begitu signifikan untuk belanja baranga BBM Kapal Pengawas.

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai***Rp3.572.301.681*

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.572.301.681 dan Rp. 3.556.515.085. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.763.342.414	1.823.479.682	103,41
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	34.012.295	-	
Beban Lembur	75.258.000	59.064.000	78,48
Beban Tunjangan Khusus Kinerja	1.699.688.972	-	
Sub Total	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	432	-	0,00
Jumlah	3.572.301.249	1.882.543.682	45,47

Belanja Barang
Rp14.441.099.96
 8

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.14.441.099.968 dan Rp. 10.599.002.151. Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 lebih besar dari 31 Desember 2022, karena terjadi perubahan pagu anggaran Belanja Barang dalam DIPA Stasiun PSDKP Tahuna.

Perbandingan Belanja Barang

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.259.653.706	1.052.199.814	1,20
Belanja Barang Non Operasional	9.495.872.217	5.457.568.617	1,74
Belanja Barang Persediaan	194.090.250	188.965.034	1,03
Belanja Jasa	470.370.997	404.799.071	1,16
Belanja Pemeliharaan	1.343.144.034	2.194.019.940	0,61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.692.716.607	1.124.643.175	1,51
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Jumlah Belanja Kotor	14.455.847.811	10.422.195.651	1,39
Pengembalian Belanja	-		-
Jumlah Belanja	14.455.847.811	10.422.195.651	1,39

- Belanja barang Operasional sebesar

Rp.1.259.653.706 meliputi biaya keperluan perkantoran, kegiatan pembayaran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh, belanja pengiriman surat dinas Pos pusat, belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja.

- Belanja barang non operasional sebesar Rp.9.495.872.217 meliputi kegiatan pembayaran Belanja barang non operasional lainnya, belanja bahan, Belanja honor Output Kegiatan.
- Belanja barang persediaan sebesar Rp.194.090.250 meliputi kegiatan pembayaran; Belanja barang persediaan barang konsumsi,
- Belanja barang jasa sebesar Rp.470.370.997 meliputi kegiatan pembayaran belanja jasa lainnya, belanja sewa, belanja langganan daya dan jasa lainnya, belanja langganan listrik, telepon, dan air.
- Belanja barang pemeliharaan sebesar Rp.1.342.144.034 meliputi kegiatan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan.
- Belanja barang perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.1,692.716.607 meliputi kegiatan pembayaran belanja perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar kota.

Belanja Modal
Rp2.082.413.097

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.082.413.097 dan Rp 920.643.220 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	320.304.940	209.912.100	655,35
Belanja Modal Penambah Nilai Peralatan dan Mesin	1.762.108.157	710.731.120	403,34
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Perijinan Irigasi	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambah Nilai gedung	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.082.413.097	920.643.220	0,00
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	2.082.413.097	920.643.220	126,19

Perbandingan nilai Belanja Modal tahun 2023 dan 2022 pada tabel diatas, memperlihatkan adanya Kenaikan yang signifikan dikarena yterdapat belanja Modal penambahan nilai peralatan dan mesin berupa eneral Overhaul esin Bantu Kapal Pengawas, Replatin Kapal Pengawas dan pembelian mesin Speedboat Napoleon 017.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada belanja modal tanah karena sudah direalisasikan di tahun 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 sebesar Rp.320.336.000 untuk pembelanjaan Pengadaan Kompresor Alat Selam, CCTV 1 Paket, Meja dan Kursi Rapat, AC Split, AC Standing, Dispenser, Neon Box, Running Text, Sound System set..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	320.336.000	209.912.100	65,53
Jumlah Belanja Kotor	320.336.000	209.912.100	65,53
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	320.336.000	209.912.100	65,53

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan *Periode* 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, Perbandingan Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan *Periode* 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BELANJA	31 desember 2023	31 desember 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	0	0

Tidak ada belanja Gedung dan Bangunan di tahun 2023 dan 2022, Pekerjaan telah selesai di tahun 2021.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan *Periode* 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Tidak ada belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan di tahun anggaran 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	30 Desember 2023	30 Desember 2022
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0
Belanja Modal Irigasi	0	0
Belanja Modal Jaringan		
Belanja Penambah Nilai Jalan dan Jembatan	0	0
Belanja Penambah Nilai Irigasi	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya *Periode* 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja

Bantuan Sosial

Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial *Periode* 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per *Periode* 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP dan TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai	-	-
Kwitansi yang belum di SPMkan	-	-
Bank BRI No.acc 016801000257300	-	-
GU KKP	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBP

Rp0

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar

TPA

Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih –

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31

*Piutang Lancar
Rp0*

Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar
di Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp550.725.642*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 550.725.642 dan Rp 577.730.711 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Periode 31 Desember 2023 dan 31
Desember 2022*

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	3.778.650	25.204.400
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Suku Cadang	546.946.992	552.526.311
Jumlah	550.725.642	577.730.711

Berikut ini Rincian Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut; Persediaan Konsumsi terdiri dari alat tulis Rp.67.000; Tinta Tulis Rp.290.000; Buku Tulis Rp.45.500; Ordner Map Rp.100.000; Alat perekat Rp. 171.000; Staples Rp.89.000; Isi Staples Rp.33.000; Kertas HVS Rp.1.008.000; Berbagai Kertas Rp. 95.000; Tinta cetak Rp.1.455.000; tinta Toner Rp.430.000; Batu Batrai Rp.23.700; berdasarkan Berita Acara Opaname Fisik Persediaan Nomor. B.2013/PSDKPSta.6/PL.510/XII/2023 Tanggal 31 Desember 2023.

*Tagihan TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan

kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp2.228.156.034*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp.2.228.156.034 dan Rp.2.228.156.034. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 2.141 meter persegi senilai Rp 574.030.000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2.228.156.034
Mutasi tambah:	0
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	0
Pengembangan melalui KDP	0
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2023	2.228.156.034

Rincian Tanah TA 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai 31 Des 2023	Nilai Koreksi	Nilai 31 Des 2023
1	561 m2	Kab. Kepulauan Sangihe	257.034.000	-	257.034.000
2	731 m2	Kab. Kepulauan Talaud	95.176.000	-	95.176.000
3	849 m2	Kab. Kepulauan Talaud	221.820.000	-	221.820.000
4	1500m2	Kab. Kepulauan Sangihe	1.654.126.034	-	1.654.126.034
Jumlah			2.228.156.034	-	2.228.156.034

Peralatan dan

Mesin

Rp. 40.055.217.176

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 40.055.217.176 dan Rp 38.043.003.146 Nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	38.043.003.146
Mutasi tambah:	
Pembelian	2.082.476.000
Reklas Masuk	101.547.796
Transfer Masuk	1.450.000
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	173.196.863
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	40.055.280.079
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	-30.851.563.500
Nilai Buku per 31 Desember 2023	9.203.716.579

Saldo perolehan nilai per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 38.043.003.146 nilai ini mengalami perubahan pada tahun 2023 dengan adanya pembelian Kompresor Selam Rp.49.999.950; Kursi Besi Rp.12.032.000; Meja Rapat Rp.6.888.000; Sound System Rp.57.388.160; Dispenser Rp.5.023.820; Neon Box Rp.8.325.000; CCTV Rp.97.134.990; AC Split Rp.79.761.270. Running Text Rp.3.801.750; Terdapat Transfer Masuk berupa mesin finger print Rp. 1.450.000. Kemudian Terdapat Reklas Masuk berupa, Teropong keker 1 (satu) unit senilai Rp. 3.190.000; Alat selam seet 4 (empat) unit senilai Rp. 18.596. 526; AC Spit Rp.79.761.270.

Terdapat aset lain lain yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan Rp.71.649.067 sebagai berikut:

1	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	92	Informa	2017	1,710,500
2	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	93	Informa	2017	1,710,500
3	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	94	Informa	2017	1,710,500
4	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	95	Informa	2017	1,710,500
5	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	96	Informa	2017	1,710,500
6	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	97	Informa	2017	1,710,500
7	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	98	Informa	2017	1,710,500
8	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	99	Informa	2017	1,710,500
9	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	100	Informa	2017	1,710,500
10	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	101	Informa	2017	1,710,500
11	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	102	Informa	2017	1,524,050
12	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	103	Informa	2017	1,524,050
13	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	104	Informa	2017	1,524,050
14	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	105	Informa	2017	1,524,050
15	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	106	Informa	2017	1,524,050
16	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	107	Informa	2017	1,524,050
17	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	108	Informa	2017	1,524,050
18	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	110	Informa	2017	1,524,050
19	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	111	Informa	2017	1,524,050
20	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	12	Frontline	2012	500,000
21	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	13	Frontline	2012	500,000
22	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	14	Frontline	2012	500,000
23	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	15	Frontline	2012	500,000
24	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	16	Frontline	2012	500,000
25	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	17	Frontline	2014	679,318
26	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	18	Frontline	2014	679,318
27	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	19	Frontline	2014	679,318
28	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	20	Frontline	2014	679,318
29	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	21	Chitose	2014	679,318
30	3.05.02.04.006	Kipas Angin	1	Kulinaire	2012	1,690,000
31	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson Stylus C90	2008	724,900
32	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan	2	Canon Pixma MP258	2011	910,000

		Personal Komputer)				
33	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Canon Pixma MP258	2011	910,000
34	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Canon Pixma MP287	2015	1,704,400
35	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Canon Pixma MP287	2015	1,704,400
36	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Canon	2014	1,029,800
37	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Canon Pixma MP287	2015	1,704,400
38	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Canon Pixma MP287	2015	1,704,400
39	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Epson Stylus C90	2008	724,900
40	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Canon Pixma MP287	2015	1,704,400
41	3.05.01.05.014	External/ Portable Hardisk	1	Seagate	2011	845,000
42	3.05.01.05.014	External/ Portable Hardisk	2	Seagate	2011	845,000
43	3.05.01.05.014	P.C Unit	1	IntelCore2Duo/HP-D4260	2008	8,795,600
44	3.05.01.05.014	P.C Unit	2	IntelCore2Duo/HP-D4260	2008	8,795,600
Total						71.649.067

*Gedung dan
Bangunan
Rp9.428.726.193*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp9.428.726.193 dan Rp9.428.726.193 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9.428.726.193
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Koreksi semua hasil penilaian kembali	-
koreksi nilai tim penertiban aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	9.428.726.193
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(902.354.993)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	8.526.371.200

Jalan, Jaringan

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*dan Irigasi
Rp995.251.376*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp995.251.376 dan Rp995.251.376. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	995.251.376
Mutasi tambah:	
Pengembangan melalui KDP	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 desember 2023	995.251.376
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 desember 2023	(212.542.176)
Nilai Buku per 31 desember 2023	782.709.200

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp 0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 desember 2023	0
Nilai Buku per 31 desember 2023	0

Tahun 2023 tidak Ada Konstruksi dalam pengerjaan.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap Rp.

(34.218.796.651)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp. (34.218.796.651) dan Rp.(27.174.633.659). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	40.055.217.176	33.103.899.482	6.951.317.694
2	Gedung dan Bangunan	9.428.726.193	902.354.993	8.526.371.200
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	995.251.376	212.542.176	782.709.200
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		50.479.194.745	34.218.796.651	16.260.398.094

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas atau tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp1.775.557*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.1.775.557 dan

Rp. 1.160.757. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai tersebut berasal dari Invoice tagihan yang sudah dicatat sebagai BAST dan Kwitansi namun belum di rekam SPM dan SP2D. Utang kepada Pihak ketiga berupa Tagihan Air di bulan Desember senilai Rp. 1.743.700 sesuai Invoice C410-11012024094701 tanggal 11 Januari 2024 dan Tagihan Telepon bulan Desember Rp.31.857 sesuai Invoice No. 123-107503091874F729 tanggal 13 Januari 2024.

Pendapatan

Diterima di Muka

Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Beban yang

Masih Harus

Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

Rp19.037.504.213

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah

masing-masing sebesar Rp.19.037.504.213 dan Rp.22.097.073.044 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp 114.714.794

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.114.714.794 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	114.714.794	0	
Jumlah	114.714.794	0	0,00

Pendapatan PNBPN TA 2023 berasal dari pengenaan sanksi administrasi atas hasil pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Tahuna.

Beban Pegawai

Rp.3.572.301.249

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.572.301.249 dan Rp.3.556.515.085 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Untuk jumlah pegawai di Stasiun PSDKP Tahuna sebanyak 30 Pegawai.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.763.342.414	1.823.479.682	103,41
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	34.012.295	-	
Beban Lembur	75.258.000	59.064.000	78,48
Beban Tunjangan Khusus Kinerja	1.699.688.972	-	
Sub Total	-	-	0,00
Pengembalian Belanja	432	-	0,00
Jumlah	3.572.301.249	1.882.543.682	45,47

Beban

Persediaan

Rp215.516.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.215.516.000 dan Rp. 169.931.834. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	215.516.000	169.931.834	79
Beban Persediaan Suku Cadang	-	131.317.039	#DIV/0!
beban penyesuaian nilai persediaan	-	-	0
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0
Jumlah	215.516.000	301.248.873	140

URAIAN	Nilai
Realisasi Belanja Barang Persediaan 31 Des 2023	194.090.250
Beban Persediaan 31 Des 2023	(215.516.000)
Jumlah	-21.425.750

Selisih Realisasi Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan sebesar Rp.21.425.750 merupakan sisa Persediaan Konsumsi yang mengurangi Saldo Awal Persediaan Konsumsi sebesar Rp. 25.204.400 sehingga Saldo Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp.3.778.650, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan konsumsi 1 Januari 2023		25.204.400
Realisasi Belanja Barang Konsumsi	194.090.250	0
Beban Persediaan konsumsi	(215.516.000)	0
Selisih		-21.425.750
Saldo Akhir Persediaan konsumsi 31 Desember 2023		3.778.650

*Beban Barang
dan Jasa*

Rp11.219.248.920

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.11.219.248.920 dan Rp.7.094.677.825 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Periode
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Kantor	810.493.556	783.811.874	3,40
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	131.948.600	119.385.440	10,52
Beban Pengiriman Surat dinas PosPusat	1.574.250	1.442.500	9,13
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	143.022.000	137.850.000	4,15
Beban Barang Operasional Lainnya	166.432.500		
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	0	9.710.000	
Beban Bahan	8.978.353.027	5.142.795.695	3,34
Beban Honor Output Kegiatan	52.690.000	13.160.000	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	464.829.190	301.630.922	54,11
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	
Beban Langganan Listrik	132.065.113	128.965.500	2,40
Beban Langganan Telepon	135.325.564	151.100.187	578,44
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.580.000	5.142.882	0,00
Beban Langganan Air	32.151.200	26.521.800	#REF!
Beban Sewa	10.000.000		
Beban jasa Lainnya	157.583.920	66.707.384	#REF!
Beban jasa Profesi	1.200.000	0	
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	0	7.429.641	0,00
Jumlah	11.219.248.920	6.895.653.825	16718,60

URAIAN	Nilai
Realisasi Belanja Barang Jasa 31 Des 2023	11.212.149.077
Beban Barang dan Jasa 31 Des 2023	11.219.248.920
Jumlah	7.099.843

Selisih Realisasi Belanja Barang dan Jasa dengan Beban Barang dan Jasa sebesar (Rp.7.099.843) dikarenakan terdapat Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (Langganan Telepon dan Air) Tahun 2022 yang sudah terbayarkan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.160.757 dan terdapat Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (Langganan Telepon dan Air) pada Tahun 2023 sebesar Rp1.775.55, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Nilai	Jumlah
Belanja yang masih harus dibayar tahun 2022		
Langganan Air dan Telp	1.160.757	
Jumlah yang dibayarkan di 2023		1.160.757
Belanja barang yang masih harus dibayar tahun 2023		
Langganan Air dan Telp	1775557	
Total belanja yang masih harus dibayar		1775557
		(614.800)

Selanjutnya selisih didapatkan dari Pengembalian belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin senilai Rp.6.485.043

Beban

Pemeliharaan

Rp.1.341.238.310

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.341.238.310 dan Rp.2.076.708.699. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan semakin banyak belanja barang maupun Kontrak Pekerjaan baik itu Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Suku Cadang. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	253.755.290	223.391.980	13,59
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	811.925.901	1.721.999.680	(52,85)
Beban Pemeliharaan Jalan dan jembatan	0	0	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	275.557.110	131.317.039	109,84
Jumlah	1.341.238.301	2.076.708.699	(35,42)

URAIAN	Nilai
Realisasi Belanja Pemeliharaan 31 Des 2023	1.342.144.034
Beban Pemeliharaan 31 Des 2023	1.341.238.310
Selisih	-905.724

Selisih Realisasi Belanja Pemeliharaan dengan Beban Pemeliharaan sebesar Rp.905.724 merupakan sisa Persediaan Suku Cadang yang menambah Saldo Awal Persediaan Suku Cadang sebesar Rp. 552.526.311 sehingga Saldo Persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp.553.432.035, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan kSuku Cadang 1 Januari 2023		552.526.311
Realisasi Belanja Persediaan Suku Cadang	269.977.800	0
Beban Persediaan Suku cadang	275.557.119	0
Selisih		-5.579.319
Saldo Akhir Persediaan Suku Cadang 31 Desember 2023		546.946.992

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.1.692.716.607*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.692.716.607 dan Rp.1.124.643.175. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban Perjalanan Dinas dikarenakan bertambahnya beban kerja dari tugas dan fungsi pengawasan, Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.348.105.710	887.186.547	162.76
Beban Perjalanan Tetap	0	0	75.09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	126.750.000	122.100.000	201.15
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.332.500	0	160.62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	209.528.397	115.356.628	
Jumlah	1.692.716.607	1.124.643.175	145.12

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp5.115.667.059*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.115.667.059 dan Rp. 4.300.414.053. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.871.451.347	4.056.198.341	2,98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	208.280.885	208.280.885	79,23
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.856.000	19.856.000	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	15.753.827	15.753.827	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	325.000	325.000	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.115.667.059	4.300.414.053	0,00

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(0).

*Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.0*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	0	9.376.500	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	9.376.500	0,00

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.22.097.073.044

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.097.073.044 dan Rp.25.299.870.673.

Defisit LO

Rp(23.041.973.351)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(23.041.973.351) dan Rp(18.313.514.171). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0.

Selisih Revaluasi

Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih

Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp.0*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp20.111.084.

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.19.982.404.520*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.19.982.404.520 dan Rp. 15.160.001.756. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2023	2022
Diterima dari Entitas Lain	114.714.794	9.376.500
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.095.814.314	15.076.160.456
Transfer Keluar	-	-
Transfer Masuk	1.305.000	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	19.982.404.520	15.085.536.956

Terdapat transaksi antar entitas yang Diterima dari Entitas Lain sampai dengan 30 Juni 2023 yaitu penerimaan denda atas sanksi administrasi Hasil Pengawasan SDKP.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dd pnbp, dk blnja lra

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp.114.714.794 sedangkan DKEL sebesar Rp.20.095.814.314.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.450.000 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0. Transfer masuk berupa Mesin Finger Print dari sekretariat direktorat jenderal PSDKP sesuai BAST No. B.4955/PSDKP.2/PL.450/IX/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan telah di catat pada aplikasi persediaan.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0

Ekuitas Akhir
Rp19.037.504.213

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19.037.504.213 dan Rp. 22.126.247.274.

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SEBELUM TANGGAL NERACA

Sampai dengan tanggal Neraca 30 Juni 2022 , tidak ada kejadian penting sebelum tanggal neraca. Terdapat Pekerjaan kontraktual yang sudah berjalan, telah dilengkapi juga dengan jaminan pelaksanaan kontrak sesuai dengan SPK yang terbit. Adapun pekerjaan meliputi Replating Kapal Pengawas HIU 15 SPK. 008/SPK-Sta.6/RP.062/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023 bank Garansi dari Bank Mandiri senilai Rp.42.050.000 berlaku sejak 24 Mei 2023 sampai dengan 22 Juli 2023. Kemudian Pekerjaan GO Mesin Bantu KP HIU 15 SPK.010/PPK-Sta.6/RP.062/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 jaminan pelaksanaan dari bank garansi bank BNI senilai Rp.13.926.282 berlaku sejak 4 Juli 2023 sampai dengan 15 September 2023.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a Temuan dan Tindak lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sampai dengan selesainya penyusunan Laporan Keuangan Semester I per 30 Juni 2023 ini Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) tidak ada temuan dan tindak Lanjut BPK RI.

b Rekening Pemerintah dan NPWP Satuan Kerja.

Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening milik Stasiun PSDKP Tahuna dari KPPN Tahuna Nomor S-1860/WPB.12/KP.20/2020 Tanggal 06 Juli 2020 bahwa pada dasarnya menyetujui pembukaan rekening virtual pengeluaran pada BRI Cabang Tahuna dengan Nomor rekening Virtual **651151704451000 | BPG 083 STASIUN PSDKP TAHUNA.** NPWP Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna 00.159.964.6-825.000.a.n Stasiun PSDKP Tahuna DITJEN Pengawasan Sumberdaya Kelautan tanggal 1 April 2021.

c Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (terlampir)

dengan rincian sebagai berikut;

- Kuasa Pengguna Anggaran : Bayu Y Suharto, S.St.Pi, M.Si
- Pejabat Pembuat Komitmen: Daniel C. Tindatu, S.Pi, M.Si
- Pejabat PPSM : Eman S Monintja, S.Pi
- Bendahara Pengeluaran : Meity Tirukan, SST

d Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.

DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) Nomor: SP DIPA-032.05.2.170445/2023 tanggal 30 November 2022, dengan kode *Digital Stamp (DS)* **1687-4213-5778-3896** dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.19.386.793.000,- (*Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Pada tanggal 27 Desember 2022, dilakukan penerapan kebijakan *automatic adjustment* atau penyesuaian blokir otomatis. Kebijakan *automatic adjustment* diterapkan untuk menggantikan langkah *refocusing* anggaran. Pembebanan pada Satker Stasiun PSDKP Tahuna, sebesar Rp.1.487.892.000,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari beberapa akun belanja disetiap kegiatan yang ada.

Sampai pada Triwulan II tahun 2023, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna (170445) telah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali. Penjelasan terhadap revisi Stasiun PSDKP Tahuna, sebagai berikut:

1) Revisi DJA

a. Tema Revisi : Revisi Halaman IV A DIPA Stasiun PSDKP Tahuna

b. Mekanisme Revisi

Melakukan revisi *automatic adjustment* terhadap DIPA Stasiun PSDKP Tahuna.

c. Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi *automatic adjustment* adalah untuk pemenuhan ketersediaan dana cadangan negara.

d. Tujuan revisi anggaran

Untuk mengantisipasi keadaan darurat dalam penanganan keuangan negara.

2) Revisi Kanwil

a. Tema Revisi : Revisi Halaman III DIPA

b. Mekanisme Revisi

- Penyesuaian dan koreksi terhadap halaman III DIPA;
- Pergeseran anggaran dalam RO yang sama.

c. Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi kanwil adalah untuk koreksi halaman III DIPA dan penyesuaian terhadap belanja kegiatan.

d. Tujuan revisi anggaran

Perbaikan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya pada Triwulan I.

3) Revisi Kanwil

a. Tema Revisi : Revisi Halaman III DIPA

b. Mekanisme Revisi

- Penyesuaian dan koreksi terhadap halaman III DIPA;
- Pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam RO yang sama.

c. Alasan / pertimbangan

Dilakukannya revisi kanwil adalah untuk koreksi halaman III DIPA dan penyesuaian terhadap belanja kegiatan.

d. Tujuan revisi anggaran

Perbaikan dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya pada Triwulan II.

4) Revisi Kanwil

a. Tema Revisi : Revisi Halaman III DIPA

b. Mekanisme Revisi

- Penyesuaian dan koreksi terhadap halaman III DIPA;
- Pergeseran anggaran dalam RO yang sama;

- Pergeseran anggaran antar KRO non Prioritas Nasional.

c. Alasan / pertimbangan

Perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan.

d. Tujuan revisi anggaran

Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja dari anggaran yang ada.

e Progres Pengadaan barang dan jasa.

Untuk pengadaan barang dan jasa di Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2023, semuanya telah selesai dilaksanakan tepat dengan waktunya.

Proses Penetapan Status Penggunaan BMN

Penetapan Status Penggunaan BMN Stasiun PSDKP Tahuna telah Terbit SK Penetapan Status Penggunaan yang diterbitkan oleh KPKNL Manado dan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun asset tersebut adalah :

1. Tanah Bangunan Kantor 3 (tiga) lokasi dengan izin prinsip No. B.1123/SJ/PL.930/X/2018 dan SK PSP Kementerian Keuangan No. 241/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 senilai Rp574.030.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
2. Gedung dan Bangunan sejumlah 26 (dua puluh enam) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.101/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 senilai

Rp11.475.734.000,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

3. Kendaraan darat sejumlah 8 (delapan) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.100/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 tanggal 12 September 2018 dengan nilai sebesar Rp1.172.402.260,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).
4. Kendaraan Laut sejumlah 3 (tiga) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.110/KM.6/KN.5/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.32.653.697.411,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah).
5. Peralatan dan Mesin diatas 100 Juta sejumlah 1 (satu) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.99/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 sebesar Rp138.117.125,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
6. Peralatan dan mesin sejumlah 255 unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.241/KM.06/WKN.16/KNL.01/2018 dengan nilai penetapan Rp1.037.502.130,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus tiga puluh rupiah)

7. Peralatan dan mesin sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit dengan SK.PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan no.887/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 dengan nilai penetapan Rp.221.835.500,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
8. Jaringan sejumlah 2 (dua) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan no.733/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019 dengan nilai penetapan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
9. Bangunan Mess Operator sejumlah 2 (dua) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.07/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp1.876.837.884,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
10. Irigasi (Talud Penahan Air) sejumlah 1 (satu) unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.24/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp426.646.350,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
11. Tanah Kantor sejumlah 1 (satu) unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.71/KM.6/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp574.030.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah).
12. Peralatan dan mesin sejumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan SK.PSP Kementerian Keuangan

No.36/KM.06/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp332.474.640,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).

13. Peralatan dan mesin sejumlah 3 (tiga) unit Kendaraan dengan SK.PSP Kementerian Keuangan No.270/KM.06/WKN.16/KNL.01/2020 dengan nilai penetapan Rp485.400.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

14. Peralatan dan mesin sejumlah 5 (lima) unit dengan SK PSP

Kementerian Kelautan dan
Perikanan

no.293/KEPMENKP/SJ/PL.930/2023 tanggal 30
Mei 2023 dengan nilai akumulasi
Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta
rupiah).

15. Gedung dan Bangunan sejumlah 1 (satu) unit dengan SK PSP Kementerian Keuangan No.189/KM.6/KNL.1601/2023 senilai Rp1.386.010.546,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
16. Peralatan dan mesin sejumlah 93 (Sembilan Puluh Tiga) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No.426/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan nilai akumulasi Rp 261.276.565,00 (dua ratus tujuh enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
17. Peralatan dan Mesin sejumlah 16 (enam belas) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 884/KEPMEN-KPSJ/PL.710/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan nilai akumulasi Rp. 93.408.730 (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
18. Peralatan dan mesin sejumlah 8 (delapan) unit dengan SK PSP Kementerian Kelautan dan Perikanan No.188/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan nilai akumulasi

Rp. 228.346.210 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah)